

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja PD atau Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja PD merupakan satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Perubahan Renja PD mempunyai tugas penting dan sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di unit pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi seperti RKPD, Renstra PD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Kualitas penyusunan Perubahan Renja PD akan sangat menentukan kualitas pelayanan PD yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Penyusunan Perubahan Renja PD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup (a) Tahap perumusan rancangan Perubahan Renja PD dan (b) Perumusan rancangan akhir Perubahan Renja PD.

Perumusan rancangan Perubahan Renja PD dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan PD, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II berdasarkan Renstra PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, telaahan terhadap rancangan awal Perubahan RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Perubahan Renja PD, Penyempurnaan rancangan Perubahan Renja PD, pembahasan forum PD dan penyesuaian dokumen rancangan perubahan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait dan SPM.

1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Undang – Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja daerah
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 09 Tahun 2011 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur. No 50 tahun 2016 Tentang kedudukan susunan Organisasi tugas dan fungsi Serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cianjur.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021. Renstra yang berlaku untuk periode lima tahun dijabarkan dalam Renja setiap tahunnya dengan mempertimbangkan isu-isu strategis serta kebutuhan masyarakat yang berkembang. Dalam Renja juga diakomodir masukan yang diperoleh dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan.

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Ketercapaian Visi dan Misi tersebut sangat tergantung pada pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, yang juga akan berpengaruh pada pencapaian pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian dengan ringkas, proses penyusunan, keterkaitan antara Perubahan Renja dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra, dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja tahun 2020, rencana dan hubungannya dengan dokumen Renstra dan Perubahan RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2020

Berisi uraian mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap pencapaian target SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) serta solusi dan penyelesaiannya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020

Penguraian proses analisis kebutuhan perubahan dan temuan-temuan dari rancangan awal Perubahan RKPD

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan PD.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran terhadap isi renja ataupun hal-hal lain sesuai kebutuhan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cianjur

| NO | INDIKATOR KINERJA | SPM | IKK | TARGET RENSTRA (Tahun) | | | REALISASI CAPAIAN (Tahun) | | PROYEKSI (Tahun) | | Satuan | Catatan Analisis |
|----|---|-----|-----|------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|------------------|--------|----------|------------------|
| | | | | 2020 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif | - | - | 68,20 | 68,50 | 69,80 | 74,53 | 67,80 | 68,20 | 68,50 | Persen | |
| 2 | Jumlah Peserta KB Baru yang Dilayani | | | 97.240 | 97.240 | 97.240 | 115.808 | 97.240 | 97.240 | 97.240 | Akseptor | |
| 3 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tersesatkan Penanganannya | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persen | |

2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Pelaksanaan hasil Renja PD Tahun 2020

A. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Hasil pelaksanaan Renja selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur maka hambatan dan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Hambatan/Tantangan

| |
|--|
| HAMBATAN INTERNAL : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan kualitas SDM belum memadai 2. SOP kegiatan seluruhnya belum tersedia 3. Koordinasi antar Bidang masih belum kuat |
| HAMBATAN EKSTERNAL : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isu Gender 3. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya ketahanan keluarga 4. Masih tingginya rata-rata jumlah anak dalam berkeluarga 5. Adanya Pandemi Covid 19 |

Sumber : DPPKBP3A (2020)

Tabel. 2.3
Permasalahan

| No | Aspek | Permasalahan |
|----|--|--|
| 1 | Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 3. Masih tingginya perdagangan orang 4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isu Gender 5. Adanya Pandemi Covid 19 |
| 2 | Pembangunan Ketahanan Keluarga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pembelanjaran peningkatan usaha ekonomi keluarga 2. Masih rendahnya informasi mengenai ketahanan keluarga 3. Masih rendahnya pengembangan potensi remaja 4. Masih Lemahnya layanan informasi keluarga untuk remaja 5. Adanya Pandemi Covid 19 |
| 3 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka kelahiran 2. Masih rendahnya metode kontrasepsi jangka panjang 3. Masih rendahnya informasi data keluarga 4. Masih rendahnya layanan komunikasi informasi dan edukasi program KKBPK terhadap masyarakat 5. Adanya Pandemi Covid 19 |

B. Solusi Permasalahan dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

Tabel. 2.4
Solusi Permasalahan

| PERMASALAHAN | TANTANGAN | SOLUSI |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 3. Masih tingginya perdagangan orang 4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isu Gender | <ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak • Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isu Gender | Adanya upaya-upaya kemitraan dalam rangka mengimplementasikan kegiatan pengarusutamaan gender, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. |

| PERMASALAHAN | TANTANGAN | SOLUSI |
|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pembelanjaran peningkatan usaha ekonomi keluarga 2. Masih rendahnya informasi mengenai ketahanan keluarga 3. Masih rendahnya pengembangan potensi remaja 4. Masih Lemahnya layanan informasi keluarga untuk remaja | Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya ketahanan keluarga | <ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan pola kegiatan Tribina, UPPKS dan PIK Remaja / Mahasiswa • Menjalin kerjasama dengan instansi terkait • Optimalisasi integrasi dalam kegiatan Kampung KB |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka kelahiran 2. Masih rendahnya metode kontrasepsi jangka panjang 3. Masih rendahnya informasi data keluarga 4. Masih rendahnya layanan komunikasi informasi dan edukasi program KKBPK terhadap masyarakat 5. Terjadinya Baby Boom | Masih tingginya rata-rata jumlah anak dalam berkeluarga | <ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan pola kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)dalam Sosialisasi program KKBPK dengan memanfaatkan berbagai media sosial, media cetak dan media elektronik • Memberdayakan petugas lini lapangan sampai ke tingkat RT, dimulai dari PKB, TPD, Pos KB, Sub Pos KB, PPL Posyandu, Kader Posyandu dan kelompok KB di tingkat RT • Mengadakan Peningkatan kapasitas petugas lini lapangan berupa pemberian pelatihan mengenai program KKBPK • Mengadakan pelayanan dengan mobil pelayanan (Moyan) • Optimalisasi integrasi dalam kegiatan Kampung KB |

Dari tabel hambatan dan masalah serta tantangan dan peluang dapat ditentukan isu-isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah masih rendahnya pemberdayaan terhadap perempuan, masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih tingginya angka kelahiran di tahun 2020.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi.

Adapun Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan angka kelahiran
2. Meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak

Sedangkan indikator tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3. Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurannya sebagai berikut :

➤ Sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan hak-hak anak

➤ Indikator Sasaran :

1. Angka kelahiran total per WUS (15-49 tahun)
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3. Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020

Hasil analisis kebutuhan terdapat perubahan terhadap rancangan Perubahan RKPD. Rancangan Perubahan memenuhi Honorarium Kader Posyandu. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cianjur

| Rancangan Perubahan RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------|---|--------------|--|--|-------------------------|---|--------------|--|--|-------------------------|-----------------|
| No | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| 1 | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga | | Persentase peserta KB aktif | 68,50 % | 34.398.859.500,00 | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga | | Persentase peserta KB aktif | 68,20 % | 34.398.859.500,00 | |
| | | | Terbinanya Institusi Masyarakat Pedesaan | 2.865 | | | | | Terbinanya Institusi Masyarakat Pedesaan | | 2.860 |
| 1,1 | Pembangunan Ketahanan Keluarga | Kab. Cianjur | Jumlah Kelompok tribina yang dibina | 2257 kelompok | 840.472.500,00 | Pembangunan Ketahanan Keluarga | Kab. Cianjur | Jumlah Kelompok tribina yang dibina | 2252 kelompok | 840.472.500,00 | |
| | | | Jumlah kelompok UPPKS yang dibina | 409 kelompok | | | | Jumlah kelompok UPPKS yang dibina | 409 kelompok | | |
| | | | Jumlah Kelompok PIK R/IM yang diatih | 199 kelompok | | | | Jumlah Kelompok PIK R/IM yang diatih | 199 kelompok | | |
| | | | Jumlah Kegiatan TP.PKK yang difasilitasi | 2 kegiatan | | | | Jumlah Kegiatan TP.PKK yang difasilitasi | 2 kegiatan | | |
| 1,2 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kab. Cianjur | Jumlah Peserta KB yang dilayani | 97.240 akseptor | 23.131.693.000,00 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kab. Cianjur | Jumlah Peserta KB yang dilayani | 97.240 akseptor | 23.131.693.000,00 | |
| | | | Jumlah KK dalam data keluarga yang di up date | 713.992 KK | | | | Jumlah KK dalam data keluarga yang di up date | 713.992 KK | | |
| | | | Jumlah kader posyandu yang memperoleh <u>honorarium</u> | 14501 Kader | | | | Jumlah kader posyandu yang memperoleh <u>honorarium</u> | 8.694 kader | | |
| | | | Jumlah KIE melalui mupen dan radio komunitas yang dilaksanakan | 64 Kali | | | | Jumlah KIE melalui mupen dan radio komunitas yang dilaksanakan | 64 Kali | | |
| 1,3 | Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik) | Kab. Cianjur | Jumlah Balai Penyuluhan PPKBP3A yang mendapat bantuan operasional keluarga Berencana | 32 Balai Penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan | 8.888.654.000 | Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik) | Kab. Cianjur | Jumlah Balai Penyuluhan PPKBP3A yang mendapat bantuan operasional keluarga Berencana | 32 Balai Penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan | 8.888.654.000 | |
| 1,4 | Pengadaan Saran Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK) | Kab. Cianjur | Jumlah KIE KIT yang tersedia | 10 Set | 1.461.138.000,00 | Pengadaan Saran Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK) | Kab. Cianjur | Jumlah KIE KIT yang tersedia | 10 Set | 1.461.138.000,00 | |
| | | | Jumlah Seragam Kerja Bag PPKB dan Sub PPKBD yang tersedia | 800 Pcs | | | | Jumlah Seragam Kerja Bag PPKB dan Sub PPKBD yang tersedia | 800 Pcs | | |
| | | | Jumlah BKB KIT yang tersedia | 10 Set | | | | Jumlah BKB KIT yang tersedia | 10 Set | | |
| | | | Jumlah IUD KIT yang tersedia | 17 Set | | | | Jumlah IUD KIT yang tersedia | 17 Set | | |
| | | | Jumlah Implant Removal KIT yang Tersedia | 17 Set | | | | Jumlah Implant Removal KIT yang Tersedia | 17 Set | | |
| | | | Jumlah Papan Nama Rumah Data Kependudukan | 1 Unit | | | | Jumlah Papan Nama Rumah Data Kependudukan | 1 Unit | | |
| | | | Jumlah Display Rumah Data | 2 Buah | | | | Jumlah Display Rumah Data | 2 Buah | | |
| | | | Jumlah Leaflet Rumah Dataku yang tersedia | 1880 Buah | | | | Jumlah Leaflet Rumah Dataku yang tersedia | 1880 Buah | | |
| | | | Jumlah Komputer PC yang tersedia | 1 Unit | | | | Jumlah Komputer PC yang tersedia | 1 Unit | | |
| | | | Jumlah Rak Buku yang tersedia | 2 Unit | | | | Jumlah Rak Buku yang tersedia | 2 Unit | | |
| | | | Pemagaran Balai Penyuluhan KB yang tersedia | 13 Unit | | | | Pemagaran Balai Penyuluhan KB yang tersedia | 13 Unit | | |
| | | | Jumlah Sarana MOK Balai Penyuluhan KB Tk. Kecamatan yang tersedia | 1 Unit | | | | Jumlah Sarana MOK Balai Penyuluhan KB Tk. Kecamatan yang tersedia | 1 Unit | | |
| 1,5 | Pengadaan Sarana dan Piasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya Umum DAK) | Kab. Cianjur | Jumlah dokumen pengadaan yang tersedia | 12 Dok | 76.902.000,00 | Pengadaan Sarana dan Piasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya Umum DAK) | Kab. Cianjur | Jumlah dokumen pengadaan yang tersedia | 12 Dok | 76.902.000,00 | |
| 2 | Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | Jumlah kelembagaan PUG aktif | 27 Lembaga | 756.637.166,00 | Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | Jumlah kelembagaan PUG aktif | 27 Lembaga | 756.637.166,00 | |
| | | | Cakupan Peranganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 100% | | | | Cakupan Peranganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 100% | | |
| 2,1 | Perlindungan Perempuan dan Anak | Kab. Cianjur | Jumlah pembinaan Forum Anak tingkat kecamatan dan desa | 4 kali | 585.200.166,00 | Perlindungan Perempuan dan Anak | Kab. Cianjur | Jumlah pembinaan Forum Anak tingkat kecamatan dan desa | 4 kali | 585.200.166,00 | |
| | | | Jumlah sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak | 11 kali | | | | Jumlah sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak | 11 kali | | |
| 2,2 | Pemberdayaan Perempuan | Kab. Cianjur | Jumlah kegiatan pelaksanaan PPRG | 100 warga | 171.437.000,00 | Pemberdayaan Perempuan | Kab. Cianjur | Jumlah kegiatan pelaksanaan PPRG | 100 warga | 171.437.000,00 | |
| | | | Jumlah warga binsan diklatasi P2WKSS yang dibina | 2 kali | | | | Jumlah warga binsan diklatasi P2WKSS yang dibina | 2 kali | | |

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2020

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program diharapkan akan dapat memacu peningkatan kinerja aparatur. Pelaksanaan dari program adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021, urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang diarahkan kepada 2 (Dua) program yang telah ditetapkan yaitu :

- 1. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga**
- 2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cianjur

| Kode | Tujuan Rentra | Sasaran Renstra | Indikator | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | | | |
|------|---|---------------------------------------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| | | | Kinerja Program / Kegiatan | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | | |
| -1 | | | -3 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | | |
| | Mewujudkan keberlangsungan serta meningkatkan kualitas akseleabilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran | Meningkatnya tingkat kesertaan ber-KB | | Urusan Wajib | | | | | | | | | |
| | | | | | | - Bidang Pengendalian Penduduk dan KB - Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga | | | | | | | |
| | | | | | Terbinannya pasangan Usia Subur (PUS) dalam kesertaan ber-KB | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga | Kab. Cianjur | 68,50 % | 34.398.859.500,00 | APBD | | 68,50 % | 34.398.859.500,00 |
| | | | | | Terbinanya Institusi Masyarakat Pedesaan | | Kab. Cianjur | 2.865 | | | | 2.865 | |
| | | | | | Terbinannya kader tribina | Pembangunan Ketahanan Keluarga | Kab. Cianjur | 2257 kelompok | 840.472.500,00 | APBD | | 2257 kelompok | 840.472.500,00 |
| | | | | | Terlatihnya kader UPPKS | | Kab. Cianjur | 409 kelompok | | | | 409 kelompok | |
| | | | | | Terlatihnya anggota PIK R/M | | Kab. Cianjur | 199 kelompok | | | | 199 kelompok | |
| | | | | | Terfasilitasinya kegiatan TP.PKK | | Kab. Cianjur | 2 kegiatan | | | | 2 kegiatan | |
| | | | | | Terlayannya peserta KB baru | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 32 Kecamatan | 97.240 akseptor | 23.131.693.000,00 | APBD | | 97.240 akseptor | 23.131.693.000,00 |
| | | | | | Tersediannya upa date data keluarga | | Kab. Cianjur | 713.992 KK | | | | 713.992 KK | |
| | | | | | Terpenuhiya kader Posyandu yang memperoleh honorarium | | 32 Kecamatan | 14501 Kader | | | | 14501 Kader | |
| | | | | | Terlaksanakannya KIE melalui mupen dan radio komunitas | | Kab. Cianjur | 64 Kali | | | | 64 Kali | |
| | | | | | Jumlah Balai Penyuluhan PPKBP3A yang mendapat bantuan operasional keluarga Berencana | Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik) | Kab. Cianjur | 32 Balai Penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan | 8.888.654.000 | DAK | | 32 Balai Penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan | 8.888.654.000 |

*Perubahan Renja
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (DPPKB3A)
Tahun 2020*

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|---|--------------|-------------------|----------------|------|------------|-------------------|
| | | | | | Tersedianya KIE KIT | Kab. Cianjur | 10 Set | | DAK | | 10 Set | |
| | | | | | Tersedianya Seragam Kerja Bagi PPKB dan Sub PPKBD | Kab. Cianjur | 800 Pcs | | | | 800 Pcs | |
| | | | | | Tersedianya BKB KIT | Kab. Cianjur | 10 Set | | | | 10 Set | |
| | | | | | Tersedianya IUD KIT | Kab. Cianjur | 17 Set | | | | 17 Set | |
| | | | | | Tersedianya Implant Removal KIT | Kab. Cianjur | 17 Set | | | | 17 Set | |
| | | | | | Tersedianya Papan Nama Rumah Data Kependudukan | Kab. Cianjur | 1 Unit | 1.461.138.000,00 | | DAK | 1 Unit | 1.461.138.000,00 |
| | | | | | Tersedianya Display Rumah Data | Kab. Cianjur | 2 Buah | | | | 2 Buah | |
| | | | | | Tersedianya Leaflet Rumah Dataku | Kab. Cianjur | 1880 Buah | | | | 1880 Buah | |
| | | | | | Tersedianya Komputer PC | Kab. Cianjur | 1 Unit | | | | 1 Unit | |
| | | | | | Tersedianya Rak Buku | Kecamatan | 2 Unit | | | | 2 Unit | |
| | | | | | Tersedianya Pemagaran Balai Penyuluhan KB | Kecamatan | 13 Unit | | | | 13 Unit | |
| | | | | | Tersedianya Sarana MCK Balai Penyuluh KB Tk. Kecamatan | Kecamatan | 1 Unit | | | | 1 Unit | |
| | | | | | Tersedianya dokumen pengadaan | Kab. Cianjur | 12 Dok | 76.902.000,00 | | DAK | 12 Dok | 76.902.000,00 |
| | | | | | Jumlah kelembagaan PUG aktif | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 27 Lembaga | 756.637.166,00 | | | 27 Lembaga | 756.637.166,00 |
| | | | | | Cakupan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Cianjur | 100% | | APBD | 100% | |
| | | | | | Terbinanya Forum Anak tingkat kecamatan dan desa | | Kab. Cianjur | 4 kali | | | 4 kali | |
| | | | | | Terlaksanakannya sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak | Perlindungan Perempuan dan Anak | Kab. Cianjur | 11 Kali | 585.200.166,00 | APBD | 11 Kali | 585.200.166,00 |
| | | | | | Terlaksanakannya kegiatan pelaksanaan PPRG | Pemberdayaan Perempuan | Kab. Cianjur | 100 warga | 171.437.000,00 | APBD | 100 warga | 171.437.000,00 |
| | | | | | Terlaksanakannya pembinaan warga binaan dilokasi P2WKSS | | Kab. Cianjur | 2 kali | | | 2 kali | |
| Jumlah | | | | | | | | 35.155.496.666,00 | | | | 35.155.496.666,00 |

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2020 ini disusun sebagai pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis DPPKBP3A Kabupaten Cianjur 2017 – 2021.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan akan lebih mudah untuk dapat mengendalikan Pelaksanaan Pembangunan, Khususnya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Akhirnya Kepada semua pihak kami harapkan masukannya demi lancarnya pelaksanaan kerja, dan kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.

Cianjur, 26 Agustus 2020
KEPALA
DPPKBP3A KABUPATEN CIANJUR



Drs. H. HIMAM HARIS, M.MPd
NIP. 196309011990031009